

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi telah memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia saat ini. Seperti kemudahan mendapatkan informasi dan kemudahan untuk berinteraksi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu segala aktivitas yang dilakukan manusia dengan cepat, murah, dan tepat sehingga produktivitas kegiatan akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan pelayanan berbasis pada teknologi, diantaranya didalam dunia pemerintahan *e-government*, pendidikan *e-education*, kesehatan *e-medicine*, jual beli online *e-commerce* dan lain sebagainya.

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah mengubah paradigma komunikasi yang dominan, yang sebelumnya terkesan satu arah antara pemerintah dan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi juga telah memperluas kemungkinan terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat dengan negara dan sebaliknya. Terjadi perubahan atau perubahan fungsi pemerintahan yang kini berorientasi pada pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. *E-*

government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penerapan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang demokratis, transparan, adil, bersih, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, dan efisien.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas untuk mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil. Tugas ini meliputi penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan, serta pemeliharaan dan pengembangan basis data kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait kependudukan kepada masyarakat serta menjamin hak-hak kependudukan warga negara. Salah satunya dari tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mensosialisasikan instalasi dan aktivasi aplikasi “Identitas Kependudukan Digital” (IKD).

Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu inovasi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan identitas kependudukan yang sah dan terintegrasi dalam satu sistem informasi.

Program ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat daerah.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang juga telah mengimplementasikan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini. Ditjen Dukcapil Kemendagri menetapkan target bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yakni cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk tahun ini sebesar 25% dari jumlah pemilik KTP-el di daerah. Namun, disisi lain minimnya pemahaman dan masih banyak masyarakat Kabupaten Majalengka yang belum mengetahui mengenai Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini, serta kurang meratanya sosialisasi dari pihak Disdukcapil tentang manfaat dan cara penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Oleh karena itu, keberhasilan sebuah program agar diterapkan dan digunakan oleh masyarakat, selain membutuhkan perencanaan dan tujuan, juga membutuhkan cara yang pas sehingga program itu bisa tepat mencapai sasaran dan tujuan program itu berhasil. Disdukcapil Kabupaten Majalengka perlu merancang strategi komunikasi yang efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan program Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat Kabupaten Majalengka. Strategi tersebut perlu mencakup beberapa aspek, seperti pemilihan media komunikasi yang tepat, penyampaian pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses implementasi program IKD. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui strategi

komunikasi program Identitas Kependudukan Digital IKD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul : **“Strategi Komunikasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka”**

1.2 Rumusalan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka yang menjadikan pokok dari penelitian ini adalah tentang “Strategi Komunikasi Program Aplikasi IKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka” dari pokok permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan menjadi rumusan:

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam mensosialisasikan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam mensosialisasikan program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mensosialisasikan program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini, secara umum di upayakan untuk mengetahui apa saja Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital, Sedangkan secara khusus, Penelitian ini di tunjukan untuk :

- 1) Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- 3) Untuk Mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan sosialisasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ilmu komunikasi, khususnya tentang strategi komunikasi.

- b. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya tentang literatur strategi komunikasi.

2. Kegunaan praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan evaluasi mengenai strategi komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam Sosialisasi Aplikasi IKD kepada Masyarakat Kabuaptan Majalengka.
- b. Menambah Pengetahuan dan wawasan bagi penelitian khususnya yang berkenaan dengan Strategi komunikasi program Aplikasi Digital ID.

